

**PERAN BUPATI R. A KARTA NATA NEGARA DALAM SISTEM  
TANAM PAKSA DI KABUPATEN LEBAK 1830-1870**



Oleh:

**Ela Hikmah Hayati, S. Hum**

**1520510093**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**TESIS**

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Master of Art (M. A)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam**

**Yogyakarta**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ela Hikmah Hayati, S. Hum**  
NIM : 1520510093  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



**Ela Hikmah Hayati, S. Hum**

NIM: 1520510093

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ela Hikmah Hayati, S. Hum**  
NIM : 1520510093  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



**Ela Hikmah Hayati, S. Hum**

NIM: 1520510093



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

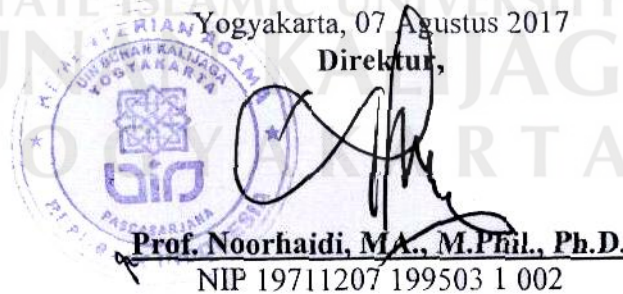
## PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PERAN BUPATI R. A KARTA NATA NEGARA  
DALAM SISTEM TANAM PAKSA DI KABUPATEN  
LEBAK 1830-1870  
Nama : Ela Hikmah Hayati  
NIM : 1520510093  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam  
Tanggal Ujian : 07 Agustus 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts  
(M.A)

Yogyakarta, 07 Agustus 2017

Direktur,



**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP 19711207 199503 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PERAN BUPATI R. A KARTA NATA NEGARA  
DALAM SISTEM TANAM PAKSA DI  
KABUPATEN LEBAK 1830-1870

Nama : Ela Hikmah Hayati

NIM : 1520510093

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Mohammad Yunus, Lc.,M.A.

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. Djoko Suryo, MA.

Penguji : Dr. H. Muhammad Wildan, MA.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 07 Agustus 2017

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil/Nilai : 85,16 / B+

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

Handwritten signatures and stamps of the examiners. The top signature is in blue ink and appears to be 'Yunus'. Below it is another signature in blue ink, possibly 'Djoko Suryo', with a stamp that reads 'a.n: Prof. Dr. Djoko Suryo - MA'. At the bottom is a signature in blue ink, possibly 'Wildan'.

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERAN BUPATI R. A KARTA NATA NEGARA DALAM SISTEM  
TANAM PAKSA DI KABUPATEN LEBAK 1830-1870**

Yang ditulis oleh:

Nama : **Ela Hikmah Hayati, S. Hum**  
NIM : 1520510093  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Art (M. A).

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Pembimbing,



**Prof. Dr. Djoko Suryo, M. A**

## ABSTRAK

**Ela Hikmah Hayati, Nim. 1520510093, 2017, Peran Bupati R. A Karta Nata Negara dalam Sistem Tanam Paksa di Kabupaten Lebak 1830-1870, Pembimbing, Prof. Dr. Djoko Suryo, M. A**

Studi ini membahas tentang peran bupati R. A Karta Nata Negara dalam sistem tanam paksa di Kabupaten Lebak 1830-1870. Peran yang meliputi dua aspek kehidupan diantara perekonomian dan perpolitikan yang ada di Kabupaten Lebak. Fokus pembahasan dalam studi ini akan mengungkap pokok permasalahan tentang: (1) selang pandang kehidupan di Kabupaten Lebak dan biografi politik R. A Karta Nata Negara ketika menjabat sebagai bupati di sana, (2) peran bupati R. A Karta Nata Negara dalam proses eksploitasi pemerintahan Kolonial Belanda melalui sistem tanam paksa, (3) dampak dari penerapan sistem tanam paksa dan juga dampak dari proses eksploitasi di Kabupaten Lebak. Dengan bermaksud untuk mendeskripsikan dan merekonstruksi sejarah politik-ekonomi dalam proses sistem tanam paksa di Kabupaten Lebak, berdasarkan dengan tujuan dan kegunaannya yaitu: *pertama*, untuk mengetahui biografi politik bupati R. A Karta Nata Negara di Kabupaten Lebak. *Kedua*, untuk melihat peran bupati R. A Karta Nata Negara dalam proses eksploitasi sistem tanam paksa di Kabupaten Lebak. *Ketiga*, untuk mengetahui dampak dari penerapan sistem tanam paksa dan proses eksploitasi yang terjadi di Kabupaten Lebak.

Studi ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan melalui observasi studi pustaka, yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Landasan teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu *teori patronase (patron-klien) model Sydel F. Silverman* untuk menganalisis peran bupati dalam proses eksploitasi yang dilakukan terhadap rakyat pribumi di Kabupaten Lebak. Data yang diperoleh secara keseluruhan melalui observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini telah memperlihatkan bahwa biografi politik bupati R. A Karta Nata Negara berasal dari pengangkatan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda dengan melihat karakter yang dimiliki bupati saat itu, melalui keturunan, kepiawaian, jujur dan setia terhadap pemerintah. Peran bupati sebagai patron-klien yang memiliki prestise dalam memimpin pemerintahan daerah, yang menginginkan keuntungan dari sistem tanam paksa telah membuktikan bahwa terjadinya perubahan pada seseorang atau kelompok dalam perstruktur hubungan masyarakat antara sistem komunitas dengan sistem nasional. Sistem tersebut dijumpai oleh adanya mediasi yang diwakili mediator sebagai bentuk dari penguasa daerah (bupati). Bupati dalam hal ini bertujuan memberikan perubahan yang sudah tidak berlaku lagi pada masanya. Sehingga hal ini berdampak pada peluang para pejabat yang ingin melakukan eksploitasi pemerintahan dan terjadi berbagai macam perlawanan yang mengakibatkan rakyatnya menderita. Sampai pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem tanam paksa di tahun 1870-an.

**Kata Kunci: Peran, Bupati, Eksploitasi, Sistem Tanam Paksa, Lebak.**

**MOTTO:**

**STUDY NOW OR  
STUPID FOREVER**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Tesis ini kupersembahkan kepada:**

**Kepada ibu tercinta dan tersayang Mutamimah, S. Pd dan Bapak tercinta**

**Johadi semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan juga sehat selalu.**

**Kasih sayang tak ada habisnya dari kalian.....**



**Dan kupersembahkan juga untuk Almamater tercinta**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies**

**Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam**

**Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Pada penulisan tesis yang penulis angkat dengan judul "*Peran Bupati R. A Karta Nata Negara Dalam Sistem Tanam Paksa Di Kabupaten Lebak 1830-1870*" merupakan suatu syarat untuk menyelesaikan studi dan mencapai gelar Master of Art di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih, penghargaan dan juga penghormatan begitu tinggi kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M. A., M. Phil., Ph. D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Ro'fah, BSW, M. A., selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Prof. Dr. Djoko Suryo, M. A., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dengan penuh kesabaran sampai tesis ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya. Begitupun kepada seluruh karyawan dan petugas Pascasarjana UIN Suka. Keramahan dan Profesionalisme yang selalu dijunjung dalam melayani kami menjadi lading amal di sisi Allah Swt.
6. Tak terlupakan, terima kasih banyak kepada kedua orangtuaku yang tercinta dan terkasih ibunda Mutamimah, S. Pd dan ayahanda Johadi, semoga Allah Swt selalu menjaga dan memberikan kesehatan untuk dapat menjalankan segala aktivitas sehari-hari dan selalu berada di samping putrimu ini dengan ridha Allah Swt.
7. Begitu juga kepada tetehku Ema Mahdiyah, teteh Istiqomah dan suaminya, adiku tercinta Fajar Nuansa Pertiwi, bibiku Rosmini dan mamang Mulyana terimakasih kepada kalian semua yang selalu memberikan dukungan dan bantuan moral maupun moril terhadap adikmu ini, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
8. Sahabat dan juga teman-temanku seperjuangan SKI angkatan 2015, kita adalah keluarga di Yogyakarta sehingga kebersamaan, canda tawa, dan semangat dalam kuliah menjadikan motivasi dan inspirasi yang sangat berharga. Tanpa kalian, cerita atau kenangan selama kuliah di UIN Suka

Kalijaga tidak akan ada artinya. Sampai jumpa kembali di masa depan untuk teman dan sahabatku.

9. Terakhir, tidak lupa pula kepada teman-teman, sahabat seperjuangan selama kuliah di Jakarta yang selalu mendukung penulis melalui apapun dan juga telah membantu dalam ide-ide jenius kalian semua. Terima kasih kepada sahabatku Tati Rohayati, Irna Agustiani, Syawalia Rahma, Endi Aulia Garadian dan kepada kakak ku Mas Rayhan Abdillah yang telah membantu penulis dalam menyalurkan ide maupun masukan untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Karena walau bagaimanapun penulis hanya manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, sangat diharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk melengkapi kekurangan dalam penulisan tesis ini sebagai bahan acuan evaluasi selanjutnya. Akhir kata, semoga kebaikan dari semua pihak di balas oleh Allah SWT yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini dan besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada umumnya bagi pembaca.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Saya yang menyatakan,

**Ela Hikmah Hayati, S. Hum**  
NIM: 1520510093

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>NOTA DINAS</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritis .....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II BIOGRAFI POLITIK BUPATI R. A KARTA NATA</b>	
<b>NEGARA</b> .....	29

A. Selayang Pandang Kabupaten Lebak .....	29
B. Profil Bupati R. A Karta Nata Negara .....	37
C. Perangkat Kebupatian .....	41
1. Pengakuan Pemerintah Kolonial .....	42
2. Simbol-simbol Yang Dikenakan Bupati.....	48
3. Penunjang Kerja Bupati .....	53
D. Kesimpulan .....	55
<b>BAB III PERAN    BUPATI    LEBAK    DALAM    PROSES</b>	
<b>    EKSPLOITASI PEMERINTAHAN BELANDA MELALUI</b>	
<b>    SISTEM TANAM PAKSA .....</b>	<b>57</b>
A. Sebagai Agen Pemerintahan Belanda.....	63
1. Sebagai Perangkat Birokrasi Birokrasi Dalam	
Sistem Administrasi Pemerintahan .....	66
2. Sebagai Perangkat Birokrasi Dalam Sistem Tanam	
Paksa .....	71
B. Sebagai Pemimpin Masyarakat Kabupaten Lebak	
.....	75
1. Sebagai Pemimpin Sosial .....	75
2. Sebagai Pemimpin Agama .....	82
C. Proses Ekploitasi Pemerintahan Belanda di Kabupaten	
Lebak .....	86
1. Penerapan    Sistem    Tanam    Paksa	
.....	88

2. Jenis Komoditas Tanam Paksa .....	96
<b>BAB IV DAMPAK PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA .....</b>	<b>104</b>
A. Kemerosotan Ekonomi .....	114
B. Ancaman Kelaparan .....	120
C. Munculnya Konflik di Kabupaten Lebak .....	122
1. Gerakan Perlawanan Masyarakat .....	122
a. Pencurian .....	124
b. Pembunuhan .....	126
2. Upaya Penyelesaian Masalah .....	129
D. Dampak yang Ditimbulkan dari Konflik di Kabupaten Lebak .....	131
E. Kesimpulan .....	133
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>145</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>155</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dari berbagai sumber tertulis telah ditemukan mengenai sistem tanam paksa di Pulau Jawa pada tahun 1830-1870. Namun, sejauh ini peneliti belum menemukan tulisan secara khusus mengenai peran bupati dalam sistem tanam paksa yang berkaitan pada masa itu. Untuk melengkapi tulisan tersebut, maka dari itu peneliti akan membahas dalam tesis ini tentang “Peran Bupati R. A Karta Nata Negara dalam Sistem Tanam Paksa di Kabupaten Lebak 1830-1870”. Karena peneliti menemukan potongan sumber tertulis yang membahas tentang sejarah di Kabupaten Lebak dalam sistem tanam paksa, dengan begitu peneliti mengangkat tema pada tesis ini mengenai peran bupati di dalamnya.

Peran bupati yang akan diuraikan yaitu dimulai dari pengangkatan R. A Karta Nata Negara sebagai bupati di Kabupaten Lebak yang memiliki biografi politik berbeda dengan bupati lainnya. Adapun pemilihan tahun dalam penelitian ini yang akan diuraikan dimulai dari tahun penelitian 1830, karena pada tahun tersebut merupakan awal mula pengangkatan R. A Karta Nata Negara sebagai bupati di Kabupaten Lebak dan juga pertama kali diberlakukannya sistem tanam paksa di Pulau Jawa. Sedangkan pemilihan batasan waktu penelitian pada tahun 1870, karena pada tahun ini merupakan jangka waktu lima tahun masa berakhirnya jabatan R. A Karta Nata Negara sebagai bupati (1865) dan juga masa telah dihapuskannya sistem tanam paksa di Pulau Jawa.



Terpilihnya Kabupaten Lebak sebagai objek penelitian karena Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah yang memiliki struktur geografis cukup baik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang ada di Karesidenan Banten (Kabupaten Serang, Anyer, dan Pandeglang). Terdapat pergunungan dan perbukitan yang dapat menghasilkan sumber daya alam manusia. Selain itu, di Kabupaten Lebak terdapat bupati satu-satunya dipercaya oleh pemerintahan Kolonial Belanda untuk menjalankan visi dan misi dalam melaksanakan penerapan sistem tanam paksa. Bupati yang memiliki tingkat stabilitas cukup baik di masa jabatannya dan bupati satu-satunya cukup lama menjabat di Kabupaten Lebak dari tahun 1830-1865, sedangkan bupati lain yang ada di Karesidenan Banten mengalami beberapa pergantian ketika sistem tanam paksa diberlakukan di Karesidenan Banten. Namun, sejak masa jabatan bupati Lebak berlangsung cukup lama, R. A Karta Nata Negara mendapat tuduhan melakukan eksploitasi dalam penerapan sistem tanam paksa.

Alasan-alasan seperti itulah yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Dengan tujuan untuk melihat hubungan bupati R. A Karta Nata Negara dengan pemerintah Kolonial Belanda dan juga rakyatnya serta untuk mengetahui dampak dari peran politik R. A Karta Nata Negara sebagai bupati yang memiliki pengaruh yang kuat untuk pemerintah Kolonial Belanda di Kabupaten Lebak melalui sistem tanam paksa. Jika dilihat peran bupati sebelum diberlakukannya sistem tanam paksa, pada dasarnya memiliki peran yang sama sebagai pemimpin daerah dan juga perantara (mediator) yang terikat kontrak dengan pejabat pemerintah Kolonial Belanda. Akan tetapi, perannya tersebut menjadi berbeda ketika bupati

R. A Karta Nata Negara melakukan penyelewengan setelah sistem tanam paksa diberlakukan di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Lebak. Mengenai hal ini dapat dibuktikan melalui sejarah berdirinya Kabupaten Lebak yang terlibat dalam pemberlakuan kebijakan pemerintahan Kolonial Belanda dalam sistem tanam paksa, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Kabupaten Lebak merupakan bagian dari Karesidenan Banten yang memiliki letak wilayah pergunungan dan perbukitan.<sup>1</sup> Lahirnya Kabupaten Lebak secara historis (bersejarah) tidak diketahui secara pasti kebenarannya. Namun, sejarah Kabupaten Lebak ini dapat dilihat, berawal dari ketika Gubernur Jenderal Daendels menguasai wilayah Banten sepenuhnya pada tahun 1808-1811, dengan membagi sistem administrasi di berbagai wilayah termasuk Kabupaten Lebak itu sendiri. Sayangnya, sistem tersebut tidak berjalan dengan baik karena pemerintahan Inggris telah merebut kuasa penuh wilayah Banten. Saat itu Banten masih di bawah kendali Sultan dan nama Kesultanan Banten belum sepenuhnya dirubah. Kemudian ketika Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles mulai mengepakan sayapnya di wilayah Banten, Raffles mengubah secara perlahan sistem pemerintahan yang sudah ada sebelumnya yaitu mengganti status Sultan menjadi “Bupati Sultan” dan juga mengubah nama Kesultanan Banten menjadi Karesidenan Banten pada tahun 1811. Selain itu, Raffles membagi sistem administrasi daerah di Karesidenan Banten dari tiga Kabupaten menjadi empat

---

<sup>1</sup>Jika dilihat secara geografis daerah Lebak memiliki luas wilayah sekitar 304.472 ha (3.044, 72 km persegi), disekitarnya terdapat pegunungan dan perbukitan. Adeng, “Sejarah Sosial Kabupaten Lebak” dalam *PATANJALA: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, Badan Pelestarian Nilai Budaya Bandung., Vol. 5 No. 2, (Juni 2013), 266.

Kabupaten yaitu Kabupaten Serang, Anyer, Pandeglang dan Lebak dengan masing-masing Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati.<sup>2</sup>

Ketika perjanjian *Traktat London* dibunyikan pada tahun 1814, pemerintahan Inggris dengan terpaksa menyerahkan kekuasaannya di Pulau Jawa kepada pemerintahan Kolonial Belanda.<sup>3</sup> Di bawah kendali Gubernur Jenderal Van der Capellen (1816-1826), pemerintah Kolonial Belanda melakukan berbagai macam perubahan yaitu salah satunya merekonstruksi sistem administrasi daerah dengan membaginya menjadi tiga bagian yaitu Kabupaten Utara dengan ibu kota Serang, Kabupaten Barat dengan ibu kota Caringin, dan Kabupaten Selatan dengan ibu kota Lebak. Maka dari situlah telah dinyatakan berdirinya Kabupaten Lebak, yang dipimpin oleh Tubagus Jamil atau nama lain panggilannya Pangeran Sanjaya. Namun, saat itu peran bupati belum terlihat jelas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin daerah dan sebagai bagian dari pejabat pemerintahan Kolonial Belanda. Hanya terdapat gambaran umum ketika bupati melaksanakan tugasnya di suatu daerah. Seperti melakukan perpindahan kantor pusat yang ada di ibu kota Lebak ke ibu kota Warunggunung, begitupun sebaliknya. Hal tersebut dilakukan karena jarak yang di tempuh ke Warunggunung sangatlah jauh dan jalur transportasi yang di tempuh tidak memungkinkan. Di ibu kota Lebak jalur transportasi dilakukan melalui jalur sungai, sedangkan di Warunggunung hanya dapat dilalui dengan jalan setapak saja. Maka keputusan akhir pemerintah daerah menginginkan kantor pusat berada di ibu kota Lebak.<sup>4</sup> Hal seperti itulah yang

---

<sup>2</sup>Nina H. Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah (Sultan, Ulama, Jawara)*, Cet. 1., (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), 96.

<sup>3</sup>*Ibid.*, 96.

<sup>4</sup>Laporan tahunan, Staatsblad 1828 Nomor 81

menjadi perubahan pada peran bupati. Untuk melihat peran tersebut dapat ditemukan pada kinerja bupati selama menjabat. Biasanya seorang pemimpin daerah lebih dekat dalam proses interaksi dengan rakyatnya. Karena pemimpin daerah sudah menjadi kaki tangan Sultan sebelumnya. Maka dari itu, kontak sosial yang terjalin antara keduanya tidak dapat dipisahkan dengan mudahnya. Untuk menjaga kepercayaan rakyat, bupati juga harus memiliki keahlian dalam memberikan rasa kepeduliannya terhadap rakyat.

Apalagi ketika terjadinya pergantian Gubernur Jenderal dan bupati pada tahun 1830-1833. Secara otomatis bupati dan rakyatnya harus menyesuaikan diri dengan pemimpin baru mereka. Karena banyak sekali perubahan yang terus berlanjut dalam pemberlakuan sistem administrasi yang ada di Kabupaten Lebak. Pada tahun 1830 Gubernur Jenderal Van den Bosch dipercayakan untuk memberlakukan sistem *Culturstelsel* (tanam paksa) dan sistem *afdeeling* (*divisi*) di setiap administrasi daerah. Van den Bosch juga mengganti sistem pemerintahan tradisional menjadi sistem pemerintahan modern tanpa menghapus sistem yang sudah ada (sistem tradisional). Perubahan yang dilakukan oleh Van den Bosch menyebabkan terjadinya pergantian bupati di Kabupaten Lebak.<sup>5</sup>

Adapun korban dari pergantian tersebut yaitu Pangeran Sanjaya yang ditugaskan sebelumnya menjadi bupati Lebak. Kabarnya, pergantian bupati Lebak terjadi karena adanya penangkapan Nyai Gumparo atau Gamparan oleh seorang demang di Jasinga yang bernama R. A Karta Nata Negara tahun 1830-1865. Sehingga pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk mengangkat R. A

---

<sup>5</sup>A. Saleh Djamhari, *Strategi Menjinakkan Diponegoro, Siasat Stelsel Benteng 1827-1830*, (Depok: Komunitas Bambu, 2004), 251.

Karta Nata Negara sebagai bupati Lebak dan menggantikan jabatan Pangeran Sanjaya sebagai hadiah dari penangkapan tersebut.<sup>6</sup> Walaupun bupati R. A Karta Nata Negara merupakan seorang dari keturunan *menak* (bangsawan) Priangan dan bukan dari keturunan Kesultanan Banten, tetap saja Pemerintah Kolonial Belanda menjadikannya sebagai bupati saat itu.<sup>7</sup> Karena pemerintah Kolonial Belanda memprioritaskan kriteria yang dimiliki R. A Karta Nata Negara yaitu kepiawaiannya dalam mengatur sistem administrasi yang ada di Kabupaten Lebak. Selain itu, bupati R. A Karta Nata Negara memiliki sifat yang jujur dan setia terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Tidak seperti bupati lainnya yang ada di beberapa daerah Karesidenan Banten yang memiliki kriteria berbeda dibandingkan dengan bupati Lebak. Maka dengan begitu peran bupati semakin terlihat jelas sebagai pemimpin yang memiliki ikatan feodal kuat terhadap rakyatnya dan sebagai pemimpin birokrat dari pemerintahan Kolonial Belanda yang diberi tunjangan pertahunnya.<sup>8</sup>

Apalagi ketika bupati R. A Karta Nata Negara diperintahkan oleh Van den Bosch memberi tugas kepada penduduk pribumi yang notabennya petani padi menjadi petani komersial, dengan bercocok tanam teh, kopi, tebu, nila (indigo) dan tembakau. Selain itu, bupati juga meminta kerugian dari hasil panen, dengan

---

<sup>6</sup>Hafidz Rafiudin, *Riwayat Kesulthanan Banten*, (Banten: Makbarok Kesultanan Maulana Yusuf, 2006), 108. Lihat di Nina H. Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah*, 102.

<sup>7</sup>R. A Karta Nata Negara memiliki hubungan persaudaraan dengan keluarga bupati-bupati di Priangan, persaudaraan tersebut berasal dari kakanya yang bernama Suryawinata yang menjabat menjadi bupati Bogor. Ayahnya yang bernama Moh. Tahir adalah seorang penghulu, adapun ibunya merupakan saudara perempuan R. A. A Wiratanudatar VI (Dalem Enoh) yang menjadi bupati Cianjur pada tahun 1774-1813, seorang tokoh menak Priangan yang terkenal. Nina H. Lubis, dkk, *Sejarah Kabupaten Lebak*, (Lebak: Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Pusat penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, 2006), 155-156.

<sup>8</sup>C. Fasseur, "Tentang Lebak", dalam T. Ibrahim Alfian (ed.). *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*: (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), 189.

tidak memberikan hasil upah kepada para petani. Tindakan yang dilakukan oleh bupati terhadap rakyat membuat rakyatnya geram dengan perlakuan bupati itu sendiri. Tidak heran jika hal tersebut menjadikan rakyatnya sebagai kelompok yang anarkis. Sehingga memicu terjadinya pemberontakan kecil di berbagai kalangan masyarakat pada umumnya. Namun dengan herannya, setiap kali rakyat melakukan perlawanan terhadap bupati dapat ditumpas oleh bupati dengan bantuan pemerintahan Kolonial Belanda.<sup>9</sup> Sehingga rakyat menjadi tunduk terhadap bupati dan pejabat pribumi lainnya.

Dari pemberlakuan sistem tanam paksa tersebut tidak hanya berakibat pada rakyatnya saja. Hal ini berlaku pada para pejabat yang ada di berbagai daerah, baik pejabat pribumi maupun pejabat pemerintahan Kolonial Belanda itu sendiri. Telah ditemukan kekeliruan dari pejabat pribumi dan pejabat pemerintahan Kolonial Belanda dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Seperti penyelewengan dalam mengatur urusan administrasi pemerintahan yang ada di beberapa daerah dengan segera ditumpas habis oleh pemerintah Kolonial Belanda. Namun, yang menjadi lebih menarik dari penyelewengan dan sikap nakal para pejabat pribumi dan pejabat pemerintah Kolonial Belanda yaitu berada di Kabupaten Lebak, Banten. Awalnya, seorang asisten residen baru yang bernama Edward Dowes Dekker mendapat laporan dari rakyatnya telah terjadi eksploitasi

---

<sup>9</sup>Sistem Tanam Paksa terjadi ketika Pulau Jawa telah aman dari pemerintah Kolonial Belanda yang menaklukan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830) di bawah pimpinan Gubernur Jendral van Den Bosch. Penerapan Sistem ini dilaksanakan, karena defisitnya keuangan pemerintah Kolonial Belanda akibat peperangan yang berlangsung di berbagai medan, termasuk di pulau Jawa yang memakan biaya hingga 25 juta Gulden. A. Saleh Djamhari, *Strategi Menjinakkan Diponegoro, Siasat Stelsel Benteng 1827-1830*, 251. Agar menutupi kekurangan tersebut, maka diputuskanlah untuk mengisi kembali kas pemerintah Kolonial Belanda, dengan mengadakan ekspor komoditas penting, yang dihasilkan dari tanah jajahan ke Eropa. Komoditas tersebut adalah hasil bumi seperti kopi, tebu, nila, teh dan tembakau. Robert van Niel, *Tanam Paksa di Jawa*, (Jakarta: LP3ES, 2003), 41.

di daerahnya sendiri. Kemudian Dekker melaporkan kembali kejadian tersebut kepada pemerintahan pusat melalui surat rahasianya. Maka dari situlah Dekker menuduh bupati R. A Karta Nata Negara melakukan eksploitasi melalui sistem tanam paksa di Kabupaten Lebak. Herannya, tuduhan yang dilontarkan oleh Dekker tidak ditindaklanjuti oleh pemerintahan Kolonial Belanda. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar masyarakat luas pada umumnya.<sup>10</sup>

Akibat dari tuduhan yang dilakukan Dekker, maka terjadilah pemecatan jabatan terhadap Asisten Residen oleh pemerintah Kolonial Belanda. Untuk meluapkan kekesalannya, Dekker kemudian menulis peristiwa yang telah terjadi di dalam novelnya yang berjudul *Multatuli*. Agar permasalahan ini tidak melebar, maka peneliti berasumsi bahwa selama masa penerapan sistem tanam paksa diberlakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda, peran bupati menjadi sangat penting. Bupati sebagai penghubung (mediator) antara masyarakat Kabupaten Lebak dengan pemerintah Kolonial Belanda. Terjadi ketimpangan keadaan, antara hasil yang diterima oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lebak dalam melaksanakan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa mempunyai dampak dalam kehidupan masyarakat Lebak, sehingga dapat mengubah pola pertanian sawah padi menuju pertanian komersial. Selain itu, kasus tanam Paksa yang ada di Lebak menjadi sorotan tajam untuk mengubah sistem tanam paksa di Pulau Jawa yaitu dengan menghapuskan sistem tersebut dari masyarakat Pulau Jawa. Hal yang menarik dari kajian ini adalah aspek

---

<sup>10</sup>Max Havelaar, *Multatuli*, Terj: Andi Tenri, Cet. , 2. , (Yogyakarta: Narasi, 2014), 254.

kekhususan dari praktek sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*), di Kabupaten Lebak dengan daerah lainnya di pulau Jawa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa terjadi eksploitasi pemerintah Kolonial Belanda di Kabupaten Lebak? Secara terperinci rumusan masalah yang akan di jawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana biografi politik bupati R.A Karta Nata Negara?
2. Bagaimana peran bupati R. A Karta Nata Negara dalam proses eksploitasi pemerintah Kolonial Belanda di Kabupaten Lebak?
3. Apa dampak dari penerapan sistem tanam paksa dan proses eksploitasi pemerintahan Kolonial Belanda di Kabupaten Lebak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan merekonstruksi sejarah politik-ekonomi dalam proses sistem tanam paksa di Kabupaten Lebak, berdasarkan dengan tujuan dan kegunaan yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan tersebut yaitu:

1. Untuk memahami secara lebih utuh, biografi politik bupati R. A Karta Nata Negara di Kabupaten Lebak.
2. Untuk melihat peran bupati R. A Karta Nata Negara dalam proses eksploitasi pemerintahan Kolonial Belanda melalui sistem tanam paksa yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah di Kabupaten Lebak.



3. Untuk melihat dampak dari adanya penerapan sistem tanam paksa dan proses eksploitasi pemerintahan Kolonial Belanda terhadap masyarakat Kabupaten Lebak

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian yang membahas tentang eksploitasi pemerintah Kolonial Belanda setelah Perang Jawa Diponegoro (1825-1830) dengan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) dapat dengan mudah ditemukan. Namun, eksploitasi Pemerintah Kolonial Belanda di Kabupaten Lebak secara khusus dan tentang bupati Lebak R.A Karta Nata Negara sedikit sekali, bahkan cenderung kering. Sejauh pencarian peneliti di berbagai perpustakaan dan internet, belum ada satupun penelitian berbasis akademik (skripsi, tesis atau disertasi) yang khusus membahas tentang Kabupaten Lebak selama masa kepemimpinan bupati R. A Karta Nata Negara. Kalaupun terdapat tulisan tersebut, hanya terpotong-potong dan kurang komprehensif. Sehingga hal ini menjadi celah peneliti untuk mengkaji lebih dalam masalah yang ada di Kabupaten Lebak dalam bentuk penelitian tesis.

Meskipun dikatakan kering, bukan berarti tidak ada tulisan sama sekali di dalam artikel atau penelitian tentang R. A Karta Nata Negara dalam penerapan Sistem Tanam Paksa di Kabupaten Lebak. Di antara tulisan-tulisan yang ada yang berbentuk buku, yaitu;

Nina H. Lubis, *Sejarah Kabupaten Lebak*,<sup>11</sup> adalah buku yang menceritakan sedikit latar belakang dari kehidupan R. A Karta Nata Negara, sejak ia menjabat sebagai demang di Kabupaten Bogor hingga ia diangkat menjadi Tumenggung

---

<sup>11</sup>Nina H. Lubis, dkk, *Sejarah Kabupaten Lebak*, (Lebak: Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Pusat penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, 2006).

Raden Adipati di Kabupaten Lebak. Selain itu, di dalam buku ini juga menjelaskan kisah tentang kasus asisten residen dan bupati R. A Karta Nata Negara dalam sistem tanam paksa.

Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa*,<sup>12</sup> adalah buku yang menjabarkan dengan begitu baik pelaksanaan sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel* di pulau Jawa, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat penanamnya di Pulau Jawa. Buku ini memang tidak secara khusus membicarakan mengenai Kabupaten Lebak, tetapi dari akses-akses yang ada dapat diketahui sampai sejauh mana keadaan yang terjadi secara umum di pulau Jawa.

Edward Douwes Dekker (dengan nama samaran Max Havelaar) dalam karyanya *Multatuli*<sup>13</sup> adalah sebuah karya sastra berbentuk novel yang diambil dari kisah nyata dan dialami langsung oleh sang penulis yaitu saat bertugas sebagai asisten-residen di Kabupaten Lebak selama masa sistem tanam paksa. Tulisan ini mungkin tidak dapat dikategorikan sebagai tulisan sejarah sebagaimana adanya, baik tulisan sejarah secara naratif maupun secara deskriptif-analitik, karena secara redaksional terdapat hal yang mungkin saja itu fiksi, seperti adanya percakapan di antara subyek. Untuk mengupas isi dari novel ini, maka peneliti setidaknya harus menguasai latar belakang sejarahnya serta kajian dalam pendekatan sastra.

Oleh Edward Douwes Dekker, penerapan *Cultuurstelsel* dan bupati Lebak, dijadikan sebagai subyek dalam isi novelnya yang berjudul *Multatuli*. Novel ini

---

<sup>12</sup>Robert Van Niel, *Tanam Paksa di Jawa*, (Jakarta: LP3ES, 2003).

<sup>13</sup>Max Havelaar, *Multatuli*, terj: Andi Tenri, Cet., 2. ,(Yogyakarta: Narasi, 2014).

menceritakan kebobrokan Sistem Tanam Paksa dan dampaknya, yang sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat di Kabupaten Lebak. Bupati Lebak yang seharusnya menjadi pelindung dari masyarakatnya, malah terkesan membiarkan keadaan itu dan pemerintah Kolonial Belanda cenderung membelanya. Novel inilah yang di kemudian hari menjadi inspirasi dan pegangan kaum Liberalis di Negeri Belanda untuk mengakhiri Sistem Tanam Paksa di Indonesia (pulau Jawa) yang dimulai pada tahun 1870.

Tulisan singkat dari Cess Fasseur berkaitan dengan Kabupaten Lebak, yaitu “Tentang Lebak”.<sup>14</sup> Tulisan ini mengungkapkan pandangan dari penulisnya yaitu tentang ulasan dari isi novel *Multatuli* dan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah Kolonial Belanda dalam sistem tanam paksa di Kabupaten Lebak. Tulisan ini sangat singkat, namun pandangan dari isi tulisan ini begitu luas dan itulah yang menjadi alasan rujukan peneliti dalam melihat kasus Kabupaten Lebak lebih dalam lagi.

Tulisan dari Nina Herlina Lubis dengan judul, *Banten dalam Pergumulan Sejarah (Sultan, Ulama, Jawara)*.<sup>15</sup> Untuk melihat Banten secara umum, sebaiknya tidak menyamakan keadaannya dengan daerah lainnya di Pulau Jawa. Setidaknya di Banten (termasuk Kabupaten Lebak) dan di daerah sekitarnya seperti pinggiran Buitenzorg (Bogor) dan Batavia selama abad ke-18 hingga awal abad ke-19, dengan memiliki pemimpin masyarakat yang terdapat di tiga subyek yaitu Sultan, Ulama dan Jawara (*jagoan*). Setelah kekuasaan Sultan Banten

---

<sup>14</sup>C. Fasseur, “Tentang Lebak”, dalam, T. Ibrahim Alfian (ed.), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

<sup>15</sup>Nina H. Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah (Sultan, Ulama, Jawara)* Cet. 1., (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003).

berakhir pada tahun 1808-1811, maka patron-klien masyarakat Banten berada di tangan ulama dan jawara (*jago*). Ketika ulama Banten kemudian menyingkir dari dunia politik, tampillah jawara sebagai pemimpin masyarakat, contohnya adalah R.A Karta Nata Negara. Meskipun dia dianggap keturunan bangsawan, namun dia juga adalah jawara yang menjabat sebagai demang di Jasinga, Karesidenan Buitenzorg (Bogor) sebelum menjabat sebagai bupati Lebak.

Tulisan dari Suhartono W. Pranoto mengenai sejarah perbanditan di Indonesia, *Bandit di Pedesaan Jawa, Studi Historis 1850-1942*.<sup>16</sup> Protes-protes yang diajukan masyarakat terhadap sistem tanam paksa dan dari adanya industrialisasi pertanian di Jawa, tidak ditanggapi serius oleh pemerintah Kolonial Belanda. Masyarakat Jawa menjadi frustrasi dan melampiaskannya pada tindakan-tindakan kriminal kecil, seperti; pencurian, pembakaran lahan dan melarikan diri dari daerahnya, namun tidak sampai melakukan pemberontakan dalam skala besar. Keadaan yang terjadi di Banten pada salah satu bagian dalam buku ini, menjadi rujukan mengenai bagaimana keadaan dan peristiwa kriminal yang terjadi saat itu.

Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Hingga Imperium Jilid I*<sup>17</sup> adalah sebuah tulisan sejarah tentang berbagai situasi politik dan ekonomi di Indonesia, termasuk erat kaitannya dengan daerah eksploitasi pemerintah Kolonial Belanda dalam sistem tanam paksa setelah Perang Jawa. Pada ulasannya ini, hal yang menjadi titik tolaknya adalah

---

<sup>16</sup>Suhartono W. Pranoto, *Jawa, Bandit-bandit Pedesaan Jawa, Studi Historis 1850-1942* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

<sup>17</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Hingga Imperium Jilid I*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

bagaimana bangkit dan runtuhnya kekuasaan pribumi serta gangguan dan penguasaan bangsa Eropa terhadap tanah pribumi.

Karya lain dari sudut pandang ekonomi Eropa, terdapat karya Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda, Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa, 1795-1880*.<sup>18</sup> Meskipun tidak secara spesifik menjelaskan tentang peristiwa politik yang terjadi di Pulau Jawa, namun ulasannya tentang kebijakan yang diterapkan oleh VOC dan pemerintah Kolonial Belanda mendapat porsi bahasan yang cukup besar. Pada salah satu bagian dalam buku ini dijelaskan bagaimana peran agen lokal seperti bupati sebagai perangkat untuk proses eksploitasi sistem tanam paksa di Pulau Jawa pada umumnya.

Akira Nagazumi (peny.), *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang, Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*.<sup>19</sup> Tulisan ini adalah salah satu alternatif untuk melihat bagaimana keadaan politik dan ekonomi di Indonesia selama masa penjajahan Kolonial Belanda. Dinamika dari kegiatan ekonomi pemerintahan Kolonial Belanda di kemudian hari memunculkan perlawanan sengit kaum Bumiputera setelah adanya politik liberalisme di Negeri Belanda dan di Indonesia.

Adapun karya lain, seperti dalam jurnal penelitian Sejarah yaitu karya Adeng, *Sejarah Sosial Kabupaten Lebak*,<sup>20</sup> menjelaskan tentang kehidupan sosial yang terdiri atas keadaan geografis, pemerintahan, jumlah penduduk, kehidupan

---

<sup>18</sup>Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda, Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa, 1795-1880*, terj. KITLV, (Jakarta: KITLV, 2004).

<sup>19</sup>Akira Nagazumi (peny.), *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang, Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986).

<sup>20</sup>Adeng, "Sejarah Sosial Kabupaten Lebak" dalam *PATANJALA: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, Badan Pelestarian Nilai Budaya Bandung., Vol. 5 No. 2, (Juni 2013)

sosial budaya dan pendidikan. Di dalamnya sedikit menyinggung tentang sejarah kehidupan R. A Karta Nata Negara selama menjabat menjadi bupati di Kabupaten Lebak dan menjelaskan jumlah penduduk saat itu.

Secara umum aspek pembeda tulisan-tulisan di atas dengan penelitian ini adalah dalam bentuk batasan spasial dan temporal. Tema kajian berupa peran bupati Lebak, yaitu; R. A Karta Nata Negara, juga tidak dibahas secara khusus dalam tulisan-tulisan di atas.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Untuk menganalisis studi tentang peran bupati R. A Karta Nata Negara dalam sistem tanam paksa di Kabupaten Lebak, peneliti meminjam teori yang dicetuskan oleh Sydel F. Silverman tentang patronase (patron klien). Sebagaimana studi yang telah dilakukan olehnya dalam “Patronase dan Hubungan Komunitas Bangsa di Italia Tengah” menyatakan patronase sebagai sebuah pola lintas budaya dapat didefinisikan sebagai hubungan kontraktual yang tidak sama, yang memberlakukan kewajiban-kewajiban timbal balik dari jenis yang berbeda pada masing-masing pihak. Minimum yang diberikan adalah perlindungan dan pertolongan di satu pihak dan kesetiaan di pihak lain. Hubungan ini dibangun atas landasan pribadi dan berhadapan muka, serta berkelanjutan.

Sydel menjabarkan patronase sebagai hubungan patron klien yang memiliki cara atau pola tersendiri dalam memperhatikan lintas budaya. Sydel mendefinisikan di dalam karyanya, istilah *padrone* (patron) yaitu (1) pemilik sah atas sesuatu, (2) seseorang yang dapat mengendalikan sesuatu, (3) majikan dan (4) pemberi tanah pertanian *mezzadria*, terdapat kontak minimal dengan para petani

penggarap, (5) dewa pelindung (6) seorang patron dalam hubungan patron klien. Tetapi semua pemakaian kata yang disebutkan di atas menunjuk satu orang sebagai *padrone*, seorang ini menggambarkan dasar-dasar potensial bagi pembentukan hubungan patron klien. Kemudian Sydel mendefinisikan klien yaitu memberikan balasan atau timbal balik kepada patron yang memiliki wewenang atau status tinggi, dengan tujuan menandakan kepentingan materil diri sendiri dalam tindakan timbal balik, seperti berupa kesetiaan.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari penelitiannya Sydel, patronase sebagai lintas budaya yang dimaksud dalam penelitian ini hampir serupa yaitu terdapat pemerintah Kolonial Belanda yang memiliki hubungan kontraktual dengan rakyat dan bupati sebagai pemimpin daerah yang termasuk ke dalam ranah atau kelompok masyarakat di Kabupaten Lebak. Hubungan kontraktual tersebut berjalan karena pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan kewajiban-kewajiban timbal balik dalam penerapan sistem tanam paksa yang dapat memberikan keuntungan di satu pihak dan di pihak lain, diantara keuntungan yang diperoleh hasil dari pelaksanaan sistem tanam di Kabupaten Lebak. Seperti; pemerintah Kolonial Belanda mendapat keuntungan lebih dari hasil penjualan sistem tanam paksa, rakyat mendapatkan upah gaji dari kerja rodi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa dan bupati mendapatkan bonus dari tugasnya sebagai perantara dalam menyerahkan hasil panen ke pemerintahan pusat.

---

<sup>21</sup>Sydel F. Silverman, "Patronase dan Hubungan Komunitas Bangsa di Italia Tengah", dalam Frank McGlynn dan Arthur Tuden (ed.), *Pendekatan Antropologi Pada Perilaku Politik*, Terj. Suwargono dan Nugroho, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2000), 244-246.

Ketika Sydel melakukan penelitian di Italia Tengah, di dalam karyanya Sydel menggunakan sistem *mezzadria*<sup>22</sup> sebagai penghubung atas asosiasi kontraktual antara pemilik tanah yang menyediakan tanah pertanian dan memberi modal kerja yang diperlukan dan keluarga petani yang menyediakan tenaga kerja serta peralatan kecil. Menurut Sydel sistem *mezzadria* dikenal karena memiliki tiga unsur yaitu: tanah pertanian yang terpadu, unit kerja keluarga dan partisipasi aktif dalam penanaman modal serta pelaksanaan kegiatan di pihak pemilik maupun pihak penggarap. Namun, karena sistem *mezzadria* menjadi ketergantungan besar dan keutuhan tanah pertanian pada suatu keluarga akan kebutuhan tenaga kerjanya, menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang berulang antara jumlah tenaga penggarap dan luasnya tanah pertanian. Hal ini disebabkan karena penyesuaian dibuat oleh keluarga petani terjadi perubahan di dalam keluarga. Tanah yang dipakai sangatlah luas, akan tetapi para pekerja yang dibutuhkan tidak seimbang dengan tanah yang dipakai oleh petani. Maka dari itu, terjadi perubahan dalam sistem *mezzadria* yaitu dibutuhkan tenaga kerja yang lebih dalam menggarap tanah ladang. Sehingga terjadi tekanan dalam pelaksanaan sistem *mezzadria* kepada para petani. Para petani ditugaskan mengikutsertakan keluarganya seperti istri, anak dan para saudara laki-laki mereka untuk bekerja di ladang. Agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tanah yang diberikan oleh para pemilik tanah tersebut. Karena hasilnya akan dibagi separuh-separuh antara

---

<sup>22</sup>Mezzadria merupakan suatu kumpulan atau komunitas bangsa Italia Tengah yang di dalamnya terdapat para penduduk bermayoritas petani ladang dan sawah sebanyak 80 persen petani yang berkeluarga dan 20 persen penduduk biasa yang berkeluarga. *Ibid.* , 242.



pemilik tanah dan petani. Ketidakseimbangan ini berakibat pada terpecah berainya keluarga mereka yang tidak ikut menggarap tanah.<sup>23</sup>

Dari kasus Sydel, peneliti menggunakan cara yang sama dengan menggunakan konsep penghubung patronase sebagai lintas budaya dalam patron klien yang merujuk lahirnya mediasi. Adapun mediasi yang dimaksud adalah yang dimainkan oleh mediator atau penghubung dari bupati itu sendiri untuk melaksanakan sistem tanam paksa. Tugas bupati sebagai penghubung antara pemerintah Kolonial Belanda dan rakyatnya bertujuan untuk mempermudah interaksi diantara mereka dalam menjalankan sistem tanam paksa di Kabupaten Lebak. Karena terdapat ikatan budaya yang sejak lama dibentuk oleh bupati dan rakyat, maka pemerintah Kolonial Belanda menggunakan peran bupati di dalam pelaksanaannya.

Peran bupati tersebut menjadi ketergantungan rakyat terhadap pemerintah Kolonial Belanda yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Namun, ketika pelaksanaan sistem tanam paksa itu berlangsung sedemikian rupa, adanya perubahan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa tersebut yaitu terjadi ketimpangan keadaan antara jumlah dari penggarap dan hasil yang diperoleh. Penggarapnya semakin banyak karena tanah pemerintah yang sangat luas, akan tetapi hasil dari sistem tanam paksa yang diperoleh sangat sedikit. Maka dengan begitu, pemerintah Kolonial Belanda memberikan tekanan terhadap rakyat melalui bupati agar memperbanyak tenaga kerja untuk mencapai target dari hasil tanam paksa sebelumnya. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam kasus

---

<sup>23</sup>*Ibid.* , 242-243.

ini. Yang dilihat dari penelitian ini adalah peran bupatinya melakukan kesalahan dalam pendayagunaan sistem yang berlaku. Sehingga terjadi ketimpangan keadaan di Kabupaten Lebak antara pemerintah Kolonial Belanda dengan rakyat.

Penguasaan Kolonial Belanda terhadap daerah jajahan dibentuk bukan hanya berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik di pedalaman Jawa. Tetapi berkaitan juga dengan perilaku secara individual atau kelompok penguasanya. Keterkaitan pendekatan antropologi-politik dengan masalah ini lebih ditekankan pada pola-pola yang diterapkan antara patron-kliennya yaitu permasalahan yang berkembang di dalamnya serta paradigma dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

Adapun masalah yang berkaitan yang dimaksud adalah dengan perilaku bupati R.A Karta Nata Negara tidak hanya masalah perilaku individu belaka, tetapi masalah perilaku ini sangat erat kaitannya dengan sistem yang lebih besar yang menaunginya yaitu pemerintah Kolonial Belanda. Ketika pemerintah Kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dianggap sangat menyengsarakan rakyat, maka secara otomatis setiap perilaku yang berkembang di dalamnya juga ikut berubah. Bupati adalah kepanjangan tangan pemerintah Kolonial Belanda dalam sistem patron-klien pada teori di atas. Inilah yang dilihat oleh Edward Douwes Dekker sebagai bentuk ketidakadilan bangsa Eropa terhadap bangsa Bumiputera melalui pejabat lokalnya yaitu bupati.

#### **F. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini menjadi tulisan sejarah yang dapat menggambarkan kejadian atau peristiwa masa lalu secara keseluruhan, maka peneliti menggunakan

metode ilmiah dalam penulisan sejarah yang terbagi dalam beberapa proses yaitu:<sup>24</sup>

Langkah pertama yang peneliti lakukan yaitu menentukan pemilihan topik mengenai sejarah politik-ekonomi. Mengenai hal ini, peneliti diskusikan dengan beberapa teman-teman satu kelas yaitu Nurul Fatimah dan Erwin Padli untuk menentukan obyek kajian yang diambil oleh peneliti. Pada akhirnya peneliti berdiskusi kembali dengan kakak senior yaitu Mas Raihan yang ahli dalam bidang sejarah dengan memutuskan objek kajian mengenai Kabupaten Lebak dengan fokus kajian tentang peran bupati R.A Karta Nata Negara. Setelah itu, peneliti melakukan pemverivikasian obyek kajian yang peneliti ambil dibawah bimbingan bapak Sunarwoto. Maka dengan ini peneliti ucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam penyusunan Tesis ini. Tanpa kalian semua maka penelitian ini tidak ada apa-apanya.

Selanjutnya, peneliti mencoba mengumpulkan data atau sumber (*heuristik*) yang terkait dengan objek, yang bersifat kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengacu pada sumber tertulis (dokumenter). Peneliti mencari data dari tulisan-tulisan yang mendukung seperti: buku, arsip, jurnal, artikel, Koran dan lain sebagainya dengan mendapat berbagai macam arahan dari bapak Sunarwoto, selaku dosen seminar proposal. Kemudian mas Raihan yang ahli dalam bidang sejarah ekonomi-politik dan Erwin

---

<sup>24</sup>Penelitian sejarah mempunyai lima tahapan, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan. Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2005), 90.

yang mengarahkan adanya sumber tertulis terkait dengan pembahasan dalam tesis ini.<sup>25</sup>

Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti mencari ke berbagai perpustakaan di antaranya; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) yang ada di Jakarta pusat, yang peneliti cari yaitu mengenai Arsip Kolonial Belanda seperti laporan tahunan, laporan karesidenan perkebunan dan buku yang berkaitan dengan judul tesis peneliti. Di sana terdapat arsip dan buku-buku maupun tulisan lainnya seperti jurnal, koran dan majalah yang sangat komplit dibandingkan dengan perpustakaan lainnya yang ada di beberapa daerah. Kemudian, peneliti juga mengunjungi Arsip Nasional Indonesia (ANRI) yang berada di Jakarta Timur tepatnya di Pasar Minggu. Di ANRI peneliti melakukan pencarian mengenai arsip Bantam seperti laporan umum yang ada di Karesidenan Banten, laporan perkebunan Bantam dan laporan Negara (*Staatblad*) dari tahun 1830-1865. Namun tidak semua data yang ada peneliti ambil, hanya terdapat sebagian kecilnya saja yang memiliki keterkaitan pada tesis ini.

Setelah itu, peneliti melakukan pencarian data melalui via online dengan mengunjungi website Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta. Akan tetapi, peneliti tidak menemukan data yang terkait dengan pembahasan yang peneliti ambil. Kemudian peneliti melakukan observasi ke perpustakaan Serang-Banten untuk melakukan pencarian data selanjutnya, seperti mengunjungi perpustakaan Cagar Budaya Provinsi Banten yang ada di daerah Kepandean yaitu daerah Serang Timur. Di perpustakaan tersebut, banyaknya data

---

<sup>25</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah Pengantar Metode Sejarah*, Terj Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), 100.

yang peneliti ambil yaitu salah satunya mengenai bupati Lebak, dan sejarah dari Kabupaten Lebak. Selain itu, peneliti melakukan survey ke perpustakaan Universitas Islam Negeri Serang dan pusat penelitiannya yaitu Bantenologi. Di sana peneliti menemukan salah satu data yang membahas tentang Sejarah Kabupaten Lebak yang ditulis oleh Prof. Nina Herlina Lubis. Dan tidak lengkap rasanya, jika peneliti tidak melakukan kunjungan ke Kabupaten Lebak yang terletak di bagian Selatan provinsi Banten. Dengan senang hati, peneliti berkunjung ke tempat tersebut dan kemudian menemukan berbagai tempat yang peneliti maksudkan. Selain itu, peneliti juga bertemu dengan seorang pengelola atau staf yang bekerja di Cagar Budaya Kabupaten Lebak. Ia merupakan seorang yang paham tentang sejarah asisten residen Lebak (Dowes Dekker), sampai saat ini jasa asisten residen tersebut dikenang oleh rakyat di Kabupaten Lebak. Dengan membuat perpustakaan baru bernama *Multatuli*.

Selanjutnya, peneliti mengunjungi berbagai Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti: Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan Kolose St. Ignasius di Yogyakarta, perpustakaan Universitas Gajah Mada dan perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta. Selama melakukan pencarian data di berbagai perpustakaan yang ada di daerah Yogyakarta ini, peneliti menemukan banyak data seperti sumber sekunder yang terkait dengan pembahasan judul tesis.

Agar penelitian tesis ini dapat menguatkan argumen yang ada, maka peneliti menggunakan dua sumber yang bersifat primer dan sekunder;

a. Sumber Primer:

Peneliti mendapatkan sumber primer yang berupa potongan-potongan arsip atau laporan-laporan dari pemerintah Kolonial Belanda, seperti; *Staatblad van Nederland-Indie tahun 1830-1865*, *Memorie van Overgave Residentie Banten*, *Koloniaal Verslag*, *Enciclopedia van Nederlandsch Indie*, *Arsip Cultures 1816-1920 No 42* (Salinan dari sebuah memori Van den Bosch kepada menteri jajahan mengenai sistem tanam paksa, pemukiman di Pulau Jawa, penguasaan tanah, dan sistim pajak), No 291 (laporan Banten 1867), No 1585 (Nota mengenai pajak tanah di Banten kurang lebih pada tahun 1856), No 1618 (laporan tahunan Karesidenan Banten 1836-1864), *Arsip Ikhtisar Keadaan Politik Hindia- Belanda Tahun 1839-1848*, *Ensiklopedi Indonesia 2 CES-HAM*, *Max Havelaar of de Koffijveilingen der nederlandsche Handelmaatschappij door Multatuli Toelichting op het handschrift*, serta laporan-laporan lainnya yang sezaman.

Sumber-sumber ini memang sangat kaya dengan data, namun sangat kering jika melihat keadaan yang sebenarnya. Biasanya laporan-laporan itu dibuat oleh pejabat yang tidak ingin “kehilangan muka” di hadapan atasannya, kecuali kasus-kasus khusus yang biasanya berupa surat rahasia. Meskipun berpredikat sebagai sumber primer, bukan berarti tanpa kritik. Seringkali laporan-laporan itu tidak menyentuh fakta yang sebenarnya dan terkesan hanya laporan-laporan biasa ala pemerintah Kolonial Belanda, agar

dinyatakan sebagai pemerintah penjajah “yang baik”. Sehingga jarang sekali muncul keadaan yang sebenarnya.<sup>26</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Boomgaard dalam tulisannya yang berjudul *Anak Jajahan Belanda, Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa, 1795-1880* yaitu biasanya pejabat-pejabat di daerah suka menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Sebagai contoh: di daerahnya ada masyarakat Bumiputera yang makan ubi jalar atau singkong sebagai makanan pokoknya, jarang atau bahkan tidak ditulis dalam laporan, karena akan “mencoreng muka” sang pejabat itu sendiri di hadapan atasan maupun koleganya. Jika itu sampai ditulis dalam laporan, berarti daerahnya menjadi daerah yang mengalami kesulitan. Laporan-laporan seperti itu baru muncul setelah adanya Komisi Penelitian Kesejahteraan Masyarakat Bumiputera pada tahun 1865.<sup>27</sup>

Rata-rata laporan pejabat pemerintah di daerah, didasarkan pada petunjuk dan berita-berita dari informan Bumiputera, sehingga seringkali, laporan-laporan itu juga terdapat unsur subyektif yang dapat merugikan atau menguntungkan seseorang atau golongan terhadap tindakan pemerintah Kolonial Belanda.<sup>28</sup>

b. Sumber Sekunder:

Peneliti menggunakan berbagai sumber yang berasal dari tulisan dalam bentuk buku, jurnal, surat kabar, majalah maupun internet serta

---

<sup>26</sup>A. M. Djuliaty Suroyo, *Eksplorasi Kolonial Abad XIX, Kerja Wajib di Karesidenan Kedu 1800-1890*, (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000), 12.

<sup>27</sup>Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda, Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa, 1795-1880*, hlm. 205.

<sup>28</sup>Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah, Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2001), 68.

makalah dan juga berupa pernyataan, baik dalam bentuk diskusi, serta di dalam media audio-visual seperti: televisi, kaset dan *soft copy*.

Sumber dalam penelitian ini yaitu berupa sumber sekunder seperti; karya sastra, berupa novel. Meskipun berbentuk novel, tetapi karya itu sangat erat kaitannya dengan obyek kajian dalam penelitian ini, sebab latar belakang sejarah penulisan ini berasal dari kejadian yang sebenarnya yang dialami langsung oleh sang penulis. Kelak di kemudian hari, karya sastra ini mempengaruhi parlemen di Negeri Belanda, yang mengubah haluan ideologis di daerah jajahan termasuk di Kabupaten Lebak.

Selanjutnya peneliti melakukan verifikasi data untuk menafsirkan sumber yang di dapat dengan kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah sisi luar dari sebuah tulisan, seperti bahan material tulisan serta hal-hal yang berkaitan dengan sisi luar dari isi tulisan. Tidak banyak yang dapat dikritik mengenai bahan material dalam kritik ekstern, karena pada umumnya secara material masih asli dan tersimpan rapi di depot Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional. Kalaupun isi arsip sudah dipindahkan ke bentuk *soft copy* berupa pdf dan kepingan cakram VCD, itu tidak mengubah statusnya menjadi sekunder. Karena isinya tetap sama yaitu laporan pemerintah Kolonial. Kemudian melakukan kritik intern dengan cara menelaah sisi dalam dari tulisan berupa konten atau isi tulisan, kredibilitas sang penulis serta kesahihan data yang disajikan.



Langkah tersebut untuk memastikan apakah data yang disajikan sesuai atau tidak. Sebagai contoh kritik yang dilakukan oleh peneliti, yaitu ketika menemukan kesesuaian data sebuah peristiwa dari tulisan *Memorie van Overgave* dan laporan Komisi Penelitian Kesejahteraan Bumiputera. Jika mungkin terjadi perbedaan isi, maka peneliti akan mengambil data yang lebih valid, yaitu dari Komisi Penelitian Kesejahteraan Bumiputera, karena komisi ini berdiri secara independen. Jika berkaitan dengan nama wilayah atau nama orang yang berbeda, maka peneliti lebih memprioritaskannya pada data yang disajikan dari *Memorie van Overgave*.

Langkah yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya yaitu interpretasi data, dalam proses ini melalui dua langkah, yaitu analisa dan sintesa. Proses analisa peneliti mencoba untuk menguraikan sumber-sumber yang telah didapat dan dikritik oleh peneliti. Sedangkan proses sintesa peneliti mencoba menyatukan sumber-sumber yang ada, menjadi kesatuan. Kedua langkah tersebut ditujukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang sesuai dan mendekati peristiwa yang sebenarnya. Langkah akhir yang peneliti lakukan adalah proses penulisan sejarah (historiografi). Proses ini merupakan pemaparan hasil penelitian berupa tulisan yang sesuai dengan sistematika penulisan dan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu: awal, isi dan akhir, yang terdiri beberapa bab dan sub-bab

bahasan yang jumlahnya tidak mengikat dan menguraikan hasil penelitian serta selalu berkaitan antara bab-bab tersebut.<sup>29</sup>

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, pendekatan dan landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I ini merupakan landasan pemikiran penelitian, dengan kata lain adalah proposal penelitian.

Bab II, menguraikan tentang biografi politik R. A Karta Nata Negara. Bab ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama, mengulas tentang selang pandang Kabupaten Lebak, profil bupati R. A Karta Nata Negara dan perangkat kebugatiran.

Bab III, menguraikan tentang peran bupati R. A Karta Negara di Kabupaten Lebak selama masa penerapan sistem tanam paksa yang terbagi ke dalam tiga bagian diantaranya: pertama, peran bupati sebagai Agen Pemerintah Kolonial Belanda (sebagai perangkat birokrasi dalam sistem administrasi pemerintah dan sebagai perangkat birokrasi dalam sistem tanam paksa). Kedua, peran bupati sebagai pemimpin masyarakat kabupaten Lebak (sebagai pemimpin sosial dan sebagai pemimpin agama). Ketiga, peran bupati pada proses eksploitasi pemerintahan Kolonial Belanda di Kabupaten Lebak terbagi dalam penerapan sistem tanam paksa dan Jenis komoditas tanaman.

Bab IV, menguraikan terjadi dinamika di Kabupaten Lebak selama masa penerapan sistem tanam paksa seperti terjadinya kemerosotan ekonomi, Ancaman

---

<sup>29</sup>Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 69.

Kelaparan, Munculnya Konflik di Kabupaten Lebak: memicu terbentuknya gerakan perlawanan masyarakat di dalamnya terdapat pencurian dan pembunuhan, kemudian untuk mengatasi konflik tersebut adanya upaya penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah Kolonial Belanda.

Bab V, adalah akhir dari seluruh rangkaian penelitian. Pada bagian ini adalah kesimpulan, yang berisi hasil analisa dan saran atas hasil penelitian, serta kelanjutan penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada akhir bab ini, akan dijelaskan kesimpulan dari beberapa hal pembahasan sebelumnya yang sesuai dengan pertanyaan dan tujuan di dalam pembahasan tesis ini. Kemudian di dalam bab ini juga akan disertakan saran sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui sumber tertulis pada bab-bab sebelumnya, maka akan disimpulkan melalui beberapa hal yang terkait di dalamnya, yaitu:

*Pertama*, sebenarnya biografi politik bupati R. A Karta Nata Negara dapat dipengaruhi dari struktur geografis yang ada di Kabupaten Lebak. Karena di Kabupaten Lebak terdapat pergunungan dan perbukitan yang dapat menghasilkan sumber daya ekonomi manusia, maka pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk mengangkat R. A Karta Nata Negara menjadi bupati Lebak agar menjalankan sistem tanam paksa pada tahun 1830-1865. Penunjukan R. A Karta Nata Negara sebagai orang kepercayaan pemerintah Kolonial Belanda, memperlihatkan bahwa pemerintah Kolonial Belanda memiliki visi dan misi yang sama dibalik pelaksanaan sistem tanam paksa di Kabupaten Lebak. Melalui kriteria esensial yang di miliki bupati yaitu berasal dari keturunan bangsawan Priangan, memiliki kepiawaian dalam menjalankan roda pemerintahan, jujur dan

setia, merupakan ciri khas pemerintah Kolonial Belanda dalam menjalin interaksi yang baik di balik penerapan sistem tanam paksa. Pemerintah Kolonial Belanda dengan sengaja mempertahankan sistem hirarki bermaksud untuk mencari dukungan dan kesetiaan mereka kepada pemerintah Kolonial Belanda. Dengan harapan pemerintah Kolonial Belanda, orang-orang tersebut tentunya dapat menerima atau menyukai suatu keadaan dimana prestise dan kedudukan para pejabat pribumi yang setia itu terjamin dan dihormati oleh kalangan rakyat. Tidak hanya itu, pemerintah Kolonial Belanda juga memberikan kepangkatan militer, menganggap bupati sebagai bagian dari pemerintah Kolonial Belanda, memberikan kebebasan dalam menggunakan simbol-simbol yang dikenakan bupati sejak masa Kesultanan Banten dan memberikan penunjang kerja bupati. Hal tersebut dilakukan karena untuk mempermudah hubungan antara pemerintahan Kolonial Belanda dan rakyat di Kabupaten Lebak, dengan cara melalui bupati yang memiliki pengaruh dan ikatan feodal yang kuat terhadap rakyatnya. Dengan kata lain, pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan peran bupati dalam melaksanakan sistem tanam paksa.

*Kedua*, sejak R. A Karta Nata Negara diangkat menjadi bupati di Kabupaten Lebak, ia telah dianggap sebagai agen dari pemerintahan Kolonial Belanda yang bertugas menjadi perangkat birokrasi dalam sistem administrasi pemerintahan daerah maupun pusat dan juga telah dianggap menjadi perangkat birokrasi dalam sistem tanam paksa. Tidak hanya itu, bupati R. A Karta Nata Negara juga dijadikan sebagai pemimpin sosial dan agama yang memiliki peran penting di dalamnya. Peran tersebut pada umumnya memiliki kesamaan antar satu sama lain di dalam aspek kehidupan yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, agama

dan budaya. Peran bupati dalam hal ini adalah sebagai perantara (mediator) antara pemerintahan Kolonial Belanda dengan rakyatnya yang ada di Kabupaten Lebak. Pemerintah Kolonial Belanda dan bupati melakukan kerjasama untuk mengubah pola pikir masyarakat kuno yang terpaku dengan adat tradisi. Melalui sistem tanam paksa inilah, peran bupati sebagai penyalur kekayaan hasil bumi yang memberikan perubahan dalam perekonomian dan perpolitikan di Kabupaten Lebak. Namun, perubahan tersebut memicu para pejabat untuk memperoleh keuntungan sendiri di dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Maka dari itu, proses eksploitasi sering kali terjadi di berbagai kalangan pemerintahan maupun berbagai kalangan rakyat.

Hal yang membedakan peran bupati yaitu dalam proses eksploitasi pemerintahan Kolonial Belanda melalui sistem tanam paksa adalah ketika pemerintah Kolonial Belanda mempercayai bupati R. A Karta Nata Negara sebagai perantara antara pemerintah dengan rakyat. Namun, karena terjadi ketimpangan keadaan di dalam pelaksanaannya yaitu bupati melakukan penyelewengan eksploitasi karena terdapat dorongan psikologis dan ekonomi yang membuat dirinya seperti itu. Maka dengan mudahnya bupati di tuduh oleh asisten residen Douwes Dekker melakukan perbuatan yang hina tersebut. Setelah bupati menerima tuduhan dari asisten residen Dekker, bupati ditemui oleh residen Banten untuk dimintai keterangan mengenai kasus tersebut. Namun bupati tidak mengakui atas tuduhan yang diberikan oleh Dekker. Menurut beberapa saksi yang melihat kedatangan residen Banten ke tempat kediaman bupati menyatakan bupati diberikan sebuah amplop yang tidak diketahui isi amplop tersebut apa. Para saksi tersebut menduga isi dari amplop tersebut adalah uang sogokan residen Banten.

Maka dapat disimpulkan peran bupati dalam hal ini sebagai pemereras pemerintah Kolonial Belanda maupun rakyat pribumi di Kabupaten Lebak.

*Ketiga*, sejak sistem tanam paksa di terapkan di Kabupaten Lebak, terdapat dampak eksploitasi secara berkala. Sehingga rakyatnya mengalami kerugian besar dalam pelaksanaan sistem tersebut, diantaranya: rakyat mengalami kemerosotan ekonomi yang diberi upah dari hasil tenaga kerja rakyat, terdapat ancaman kelaparan di berbagai daerah maupun distrik dan wabah penyakit yang merajalela. Kemudian timbulnya perlawanan dari berbagai pihak seperti para bandit-bandit yang di dalamnya terdapat tokoh perlawanan yang sudah tidak asing lagi di dengar yaitu Mas Jakaria. Dari dampak yang terjadi, kemudian lima tahun setelah pelaksanaan tanam paksa dan berhentinya R. A Karta Nata Negara sebagai bupati, telah mengembalikan kehidupan rakyat yang ada di Kabupaten Lebak. Meskipun tidak sepenuhnya kehidupan rakyat menjadi utuh kembali. Karena rakyat juga harus menjalankan tugasnya dalam pengurusan tanah sawah padi milik pemerintah. Kemudian hasilnya akan di bagi dua dengan pemerintah. Dengan begitu, dampak ini memberikan kehidupan rakyat menjadi lebih baik karena sistem tanam paksa telah dihapuskan.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang dapat diajukan kepada ara peneliti selanjutnya:

- 1) Meskipun dalam tulisan ini belum dikatakan sebagai tulisan yang sempurna, maka peneliti menyarankan kepada pihak dinas Kabupaten Lebak untuk mengutamakan tulisan-tulisan sejarah tokoh dari bupati-

bupati selanjutnya yang memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas.

- 2) Bagi para akademis yang ingin melanjutkan tulisan ini, berharap fokus pada bidang lain selain ekonomi dan politik. Kemungkinan yang di tulis tentang masyarakat social atau tentang keagamaan yang ada di Kabupaten Lebak pada saat itu.





## Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Boomgaard, Peter. *Anak Jajahan Belanda, Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa, 1795-1880*. Terj. KITLV. Jakarta: KITLV, 2004.
- Djamhari, A. Saleh. *Strategi Menjinakkan Diponegoro, Siasat Stelsel Benteng 1827-1830*. Depok: Komunitas Bambu, 2004.
- Fasseur, C. "Tentang Lebak", dalam, T. Ibrahim Alfian (ed.). *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Fischer, H.Th. *Pengantar Anthropologi Kebudayaan Indonesia*. Terj. Anas Makruf. Jakarta: PT Pembangunan, 1960.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah Pengantar Metode Sejarah*. terj: Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Hatmosoebro, Seohardjo. *Bupati-bupati di Jawa pada Abad 19*. Yogyakarta: Yayasan Panunggalan Lembaga Javanologi, 1986.
- Hevelaar, Max. *Multatuli*. Terj: Andi Tenri, Cet., 2. Yogyakarta: Narasi, 2014.
- Iskandar, Mohammad. *Para Pengemban Amanah, Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2001.
- Juliadi dan Wachyudin, N. "Toponimi: Sejarah Nama-namaTempat Berdasarkan Cerita Rakyat": *Lebak*. Serang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, 2014.

- Kartodirdjo, Sartono dan Suryo, Djoko. *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1994.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Cet. 1. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Hingga Imperium Jilid I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Struktur Sosial Masyarakat Tradisionil dan Kolonial*. Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1969.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*, terj. Akhmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005.
- Lubis, Nina H. *Banten dalam Pergumulan Sejarah (Sultan, Ulama, Jawara)*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003.
- \_\_\_\_\_, dkk. *Sejarah Kabupaten Lebak*. Lebak: Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Pusat penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, 2006.
- \_\_\_\_\_, dkk. *Sejarah Banten: Membangun Tradisi dan Peradaban*. Serang: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, 2014.
- Nieuwenhuys, Rob. *Hikayat Lebak*. Terj: Sitor Situmorang. Jakarta: Pustaka Jaya, 1977.
- Qayim Ismail, Ibnu. *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*. Cet. I., Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- Rosidi, Ajip. dkk. "Ensiklopedi Indonesia": *Lebak*. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1983.
- Moriyama, Mikihiro. *Semangat Baru, Kolonialisme, Budaya Cetak dan Kesusastraan Sunda Abad Ke-19*. Terj. Suryadi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2005.
- Nagazumi, Akira (peny.). *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang, Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Niel, Robert van. *Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Pranoto, Suhartono W. *Jawa, Bandit-bandit Pedesaan Jawa, Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rafiudin, Hafidz. *Riwayat Kesulthanan Banten*. Banten: Makbarok Kesultanan Maulana Yusuf, 2006.
- Silverman, Sydel F. "Patronase dan Hubungan Komunitas Bangsa di Italia Tengah", dalam Frank McGlynn dan Arthur Tuden (ed.). *Pendekatan Antropologi Pada Perilaku Politik*, terj. Suwargono dan Nugroho. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2000.
- Suroyo, A. M. Djuliaty. *Eksplorasi Kolonial Abad XIX: Kerja Wajib di Karesidenan Kedu 1800-1890*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000.
- \_\_\_\_\_. "Politik Eksploitasi Kolonial dan Perubahan Ekonomi di Indonesia, dalam: *Indonesia Dalam Arus Sejarah, Kolonisasi dan Perlawanan*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan RI, 2012.

**Jurnal:**

Adeng, “*Sejarah Sosial Kabupaten Lebak*” dalam *PATANJALA: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, Badan Pelestarian Nilai Budaya Bandung., Vol. 5 No. 2, (Juni 2013).

Sutherland, Heather. “*Notes on Java's Regent Families: Part I*”. Southeast Asia Program Publications at Cornell University, no. 16 (Oct., 1973).

**Manuskrip:**

Arsip Cultures 1816-1920 No 42 (Salinan dari sebuah memori Van den Bosch kepada menteri jajahan mengenai sistem tanam paksa, pemukiman di Pulau Jawa, penguasaan tanah, dan sistim pajak), No 291 (laporan Banten 1867), No 1585 (Nota mengenai pajak tanah di Banten kurang lebih pada tahun 1856), No 1618 (laporan tahunan Karesidenan Banten 1836-1864).

Arsip Ikhtisar Keadaan Politik Hindia- Belanda Tahun 1839-1848.

Bleeker, P. *Nieuwe Bijdragen Tot De Kennis Der Bevolking Statistiek Van Java*.

Enciclopedia van Nederlandsch Indie

Ensiklopedi Indonesia 2 CES-HAM.

Koloniaal Verslag

Laporan Bantam No 46-48, Algemeen Verslaag, *Lebak De, 17 Met 1827 Is Het Zuite Regentschap Is Pale In Bantam Besulkaat Van Het Onderdach Erchlijt Achter Lebak Gesteldheid Is Gund*.

Laporan tahunan, Staatsblad 1828 Nomor 81

Max Havelaar of de Koffij-veilingen der nederlandsche Handelmaatschappij door Multatuli Toelichting op het handschrift, (Onder redactie van Dik van der Meulen: Uitgeverij Bas Lubberhuizen).

Memorie van Overgave Residentie Banten

Staatblad van Nederland-Indie tahun 1830-1865

**Internet:**

<https://saripedia.wordpress.com/tag/peta-banten/>

<http://media-kitlv.nl/all->

[media/indeling/detail/form/advanced/start/59?q\\_searchfield=lebak](http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced/start/59?q_searchfield=lebak)

<http://historia.id/persona/jalan-menuju-lebak>

<http://media-kitlv.nl/all->

[media/indeling/detail/form/advanced/start/8?q\\_searchfield=lebak](http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced/start/8?q_searchfield=lebak)

<http://media-kitlv.nl/all->

[media/indeling/detail/form/advanced/start/55?q\\_searchfield=lebak](http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced/start/55?q_searchfield=lebak)

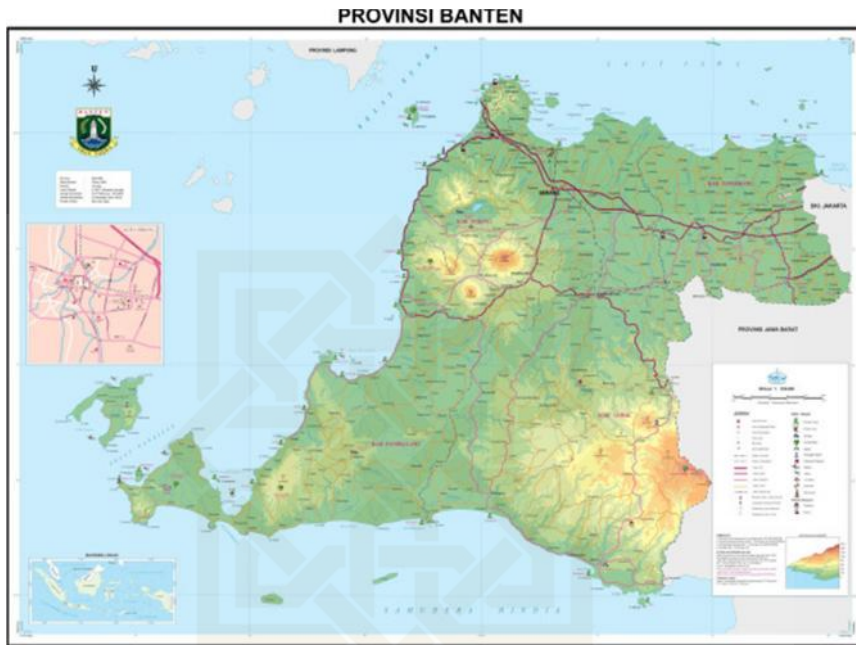
<http://media-kitlv.nl/all->

[media/indeling/detail/form/advanced?q\\_searchfield=multatuli](http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced?q_searchfield=multatuli)

<https://petatematikindo.wordpress.com/2013/12/10/administrasi-kabupaten-lebak/>

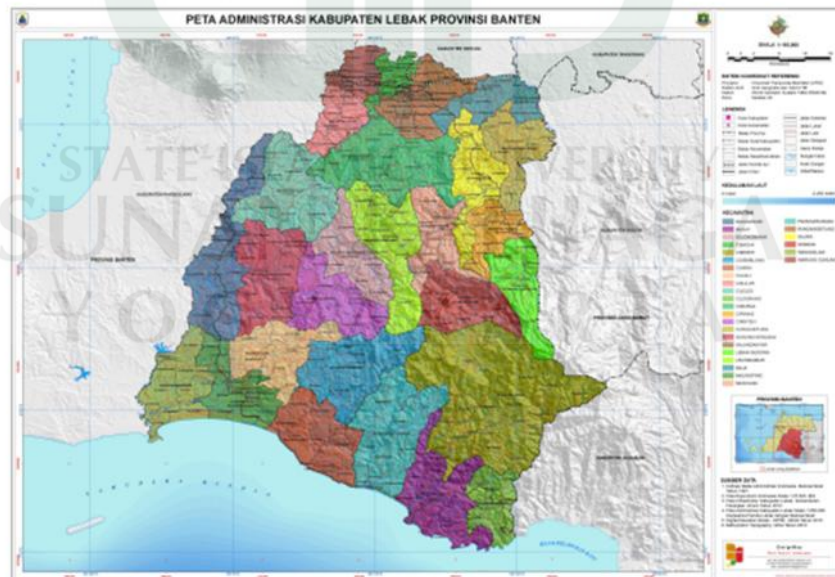
## Lampiran-lampiran

**Gambar 1: Peta Provinsi Banten**



Sumber: <https://saripedia.wordpress.com/tag/peta-banten/>

**Gambar 2: Peta Administrasi Kabupaten Lebak**



Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/12/10/administrasi-kabupaten-lebak/>

**Gambar 3: Bupati R. A Karta Nata Negara pada tahun 1846**



Sumber: [http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced/start/59?q\\_searchfield=lebak](http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced/start/59?q_searchfield=lebak)

**Gambar 4: Foto bupati Raden Adipati Karta Nata Negara pada tahun 1865**



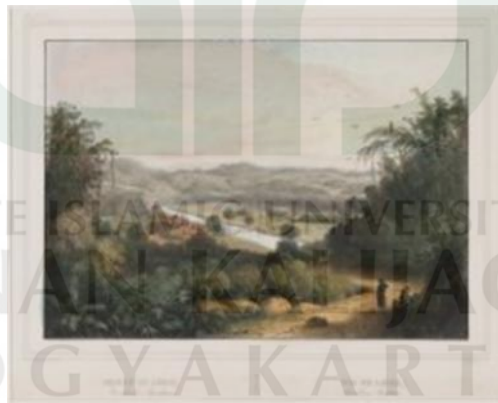
Sumber: <http://historia.id/persona/jalan-menuju-lebak>

**Gambar 5: Bupati R. A Karta Nata Negara pada tahun 1865**



Sumber: [http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced/start/8?q\\_searchfield=lebak](http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced/start/8?q_searchfield=lebak)

**Gambar 6: Pemandangan di Lebak tahun 1846**



Sumber: [http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced/start/55?q\\_searchfield=lebak](http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced/start/55?q_searchfield=lebak)



**Gambar 7: Makam bupati R. A Karta Nata Negara**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 03 Mei 2017

**Gambar 8: Perpustakaan lama Saijah Adinda**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 03 Mei 2017

**Gambar 9: Kondisi di dalam ruangan perpustakaan lama Sidjah dan Adinda**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil 03 Mei 2017

**Gambar 10: Bukti peresmian perpustakaan lama Saidjah dan Adinda**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 03 Mei 2017

**Gambar 11: Perpustakaan baru Saijah dan Adinda nampak dari depan**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 03 Mei 2017

**Gambar 12: Peninggalan bekas kantor pemerintahan Kabupaten Lebak**

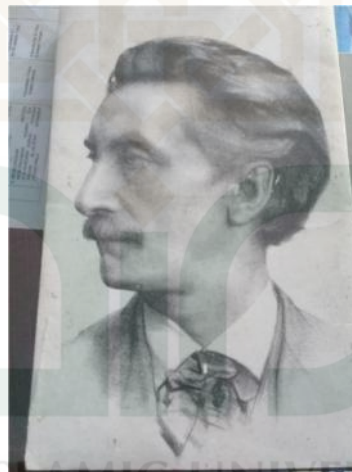


Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 03 Mei 2017

**Gambar 13: Edward Douwes Dekker pada tahun 1853**



Sumber: [http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced?q\\_searchfield=multatuli](http://media-kitlv.nl/all-media/indeling/detail/form/advanced?q_searchfield=multatuli)



Sumber: Max Havelaar of de Koffij-veilingen der nederlandsche Handelmaatschappij door Multatuli Toelichting op het handschrift, (Onder redactie van Dik van der Meulen: Uitgeverij Bas LubberHuizen)

**Gambar 14: Peninggalan Rumah Asisten Residen Douwes Dekker yang Berada di Kabupaten Lebak**



**Rumah Dowes Dekker nampak dari depan**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 03 Mei 2017

**Rumah Dowes Dekker nampak dari samping**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 03 Mei 2017

**Gambar 15: Aliran Sungai di Kabupaten Lebak sebagai pusat jalur perdagangan**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 03 Mei 2017

**Gambar 16: Jalur transportasi kereta api di Kabupaten Lebak**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 03 Mei 2017

**Gambar 17: Jembatan yang menghubungkan kota Lebak dengan kota Warunggunung**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 03 Mei 2017

**Gambar 18: Kondisi jalan raya di kota Lebak**



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 03 Mei 2017

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Ela Hikmah Hayati  
Tempat/tgl. Lahir : Pandeglang/30-11-1992  
Alamat Rumah : Jln. Kh umar jaya Rt 03/02 No 32 Ds. Kubang Kondang  
Telpon : 085773043120  
Email : elahikmahhayati\_30@yahoo.com  
Nama Ayah : Johadi  
Nama Ibu : Mutamimah, S. Pd

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Kondang Jaya 2, tahun 1999-2004
  - b. SMP Daar El Falaah , tahun 2004-2007
  - c. SMA Daar El Falaah, tahun 2007-2010
  - d. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2010-2015
  - e. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015-2017
2. Pendidikan Non Formal  
Madrasah Diniyah, tahun 2002-2004

### C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Pengabdian di SMP Daar El Falaah, tahun 2009
2. Guru Honor SD Kondang Jaya 2, tahun 2015

### D. Prestasi Penghargaan

1. Juara Harapan 1 Lomba mengarang bahasa Indonesia tingkat SD, tahun 2003
2. Juara 2 Lomba Puisi tingkat Kecamatan, tahun 2004
3. Juara Harapan 1 Lomba Marching Band, 2009
4. Beasiswa Bidik Misi Strata satu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

### E. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Pergerakan Tenaga Dasar, tahun 2006-2008
2. Organisasi Pelajar Pesantren Modern (OPPM) Daar El Falaah, tahun 2007-2009
3. Gita Nada el-Falaah, tahun 2009
4. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), tahun 2011-2015

### F. Minat Keilmuan : Sejarah Kebudayaan Islam



## G. Karya Ilmiah

### 1. Artikel

- a. Ela Hikmah Hayati. “Peran Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus: Pesantren Tebuireng)”, *Jurnal Budaya dan Agama Sahaja*, Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta. No. Vol: 6,/ Mei 2017.

### 2. Penelitian

- a. Skripsi. Ela Hikmah Hayati. “Kebijakan Mustafa Kemal Terhadap Suku Kurdi di Turki Tahun 1924-1938”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015.
- b. Tesis. Ela Hikmah Hayati. “Peran Bupati R. A Karta Nata Negara Dalam Sistem Tanam Paksa Di Kabupaten Lebak 1830-1870”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017.